

Quad vs. China: Strategic implications of Indo-Pacific rivalry against Indonesia

Faonaso Harefa¹, Asep Adang Supriyadi², Bambang Irwanto³, Guntur Eko Saputro⁴, I Nyoman Suadnyana⁵, and Cecilia F. Harsono⁶

^{1),2),3),4),5)6)} Universitas Pertahanan, Matraman, Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history

Received : Jun 22, 2025

Revised : Jul 03, 2025

Accepted : Jul 22, 2025

Abstrak

Rivalitas antara Quadrilateral Security Dialogue dan China di kawasan Indo-Pasifik semakin menguat dan membentuk arsitektur geopolitik baru yang berdampak langsung terhadap kepentingan strategis Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana implikasi multidimensi dari rivalitas Quad dan China terhadap posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, khususnya dalam aspek keamanan, ekonomi, politik luar negeri, serta pertahanan dan kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen, studi ini menemukan bahwa posisi strategis Indonesia di kawasan menjadikannya rentan terhadap dinamika militerisasi di Laut China Selatan, ketergantungan ekonomi terhadap Belt and Road Initiative, dan tekanan diplomatik dari kekuatan besar dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia harus merespons rivalitas ini melalui penguatan diplomasi aktif, modernisasi pertahanan, peningkatan kapasitas intelijen strategis, dan diversifikasi mitra kerja sama. Temuan ini juga menegaskan pentingnya Indonesia memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang di tengah rivalitas global, agar tidak hanya menjadi objek kontestasi geopolitik, melainkan juga aktor strategis yang dapat berperan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini memperkaya teori hubungan internasional Indonesia dan memberi kerangka analisis strategis bagi kebijakan luar negeri. Ke depan, disarankan pendekatan kuantitatif atau mixed-method untuk mengukur dampak rivalitas Quad dan China secara lebih terstruktur.

Abstract

The rivalry between the Quadrilateral Security Dialogue and China in the Indo-Pacific region is getting stronger and forms new geopolitical architecture that has a direct impact on Indonesia's strategic interests. This study aims to analyze the multidimensional implications of this rivalry for Indonesia, including aspects of security, economy, and foreign policy, as well as national defense and interests. Using a qualitative approach based on document analysis, this study found that Indonesia's strategic position in the region made it vulnerable to militarization dynamics in the South China Sea, economic dependence on the Belt and Road Initiative, and diplomatic pressure from the great powers of the world. The results showed that Indonesia had to respond to this rivalry through strengthening active diplomacy, defense modernization, increasing strategic intelligence capacity, and diversification of partners. This finding also confirms the importance of Indonesia positioning itself as a balancing force in the midst of global rivalry so that it is not only an object of geopolitical contestation but also a strategic actor who can play a role in maintaining the stability and peace of the Indo-Pacific region. This study enriches Indonesia's international relations theory and provides a strategic analysis framework for foreign policy. Going forward, it is recommended a quantitative approach or mixed-method to measure the impact of the Quad and Chinese rivalry in a more structured way.

Kata Kunci:

China Manuver;

Indo-Pacific;

Indonesia Defense;

Quad Policy;

Region Security.

Corresponding Author:

Faonaso Harefa,

Managemen Pertahanan

Universitas Pertahanan

Matraman, Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia

Faonaso.harefa@doktoral.idu.ac.id

This is an open access article under the CC BY-NC license.



PENDAHULUAN

Rivalitas antara Quadrilateral Security Dialogue (Quad) dan China di kawasan Indo-Pasifik tidak hanya mencerminkan perebutan pengaruh antara kekuatan besar, tetapi juga menciptakan tekanan strategis yang langsung memengaruhi posisi geopolitik dan kebijakan luar negeri Indonesia. Alih-alih menjadi arena netral, Indonesia kini menghadapi dilema strategis terkait militerisasi Laut China Selatan, ketergantungan ekonomi terhadap Belt and Road Initiative, serta tekanan diplomatik untuk berpihak. Dalam konteks ini, rivalitas tersebut membentuk arsitektur geopolitik baru yang memaksa Indonesia untuk menavigasi antara kepentingan nasional dan dinamika kekuatan eksternal. *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad) aliansi militer di kawasan ASEAN, yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia, merupakan respons terhadap meningkatnya kekhawatiran negara-negara tersebut di kawasan Indo-Pasifik terhadap meningkatnya pengaruh dan kekuatan militer China (Rafique & Shah, 2024). Gagasan Quad pertama kali muncul pada tahun 2007, yang diprakarsai oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, namun *Quadrilateral Security Dialogue* sempat redup sebelum kembali diaktifkan pada tahun 2017. Keberadaan kembali *Quadrilateral Security Dialogue* dipicu oleh ketegangan di Laut China Selatan, sengketa perbatasan India-China, dan proyek ambisius *Belt and Road Initiative* (BRI) oleh China yang dipandang sebagai instrumen ekspansi geopolitik dan ekonomi (Gabriel et al., 2020). Pada perkembangannya *Quadrilateral Security Dialogue* Quad berkembang menjadi platform strategis untuk kerja sama keamanan maritim, kebebasan navigasi, keamanan siber, dan rantai pasok global (Wilkins, 2019). Bagi China memandang *Quadrilateral Security Dialogue* sebagai bentuk aliansi yang menargetkan dan mengisolasi secara strategis. Persaingan ini menciptakan dinamika rivalitas yang semakin tajam di kawasan Indo-Pasifik dan berpotensi menyeret negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Ha, 2022).

Bagi Indonesia, rivalitas Quad-China memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas kawasan, keamanan maritim, dan posisi strategis Indonesia dalam geopolitik Indo-Pasifik (Mastro, 2022). Ketegangan ini berpotensi meningkatkan militerisasi di sekitar wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, terutama di Laut Natuna Utara, serta menekan Indonesia untuk mengambil posisi dalam pertarungan pengaruh kekuatan besar (Maulana, 2022). ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantai suatu negara, di mana negara tersebut memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati (Lennan, 2021). Konsep ini diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 (Ummah, 2019). ZEE berbeda dengan laut teritorial karena meskipun negara memiliki hak ekonomi eksklusif, wilayah ini tetap terbuka bagi pelayaran internasional selama tidak mengganggu kepentingan ekonomi dan kedaulatan negara pantai (Wiraputra et al., 2022). Selain itu, proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) oleh China dan kerja sama Quad dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi menciptakan dilema strategis bagi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dan pertahanan yang seimbang serta tetap menjunjung prinsip non-blok (He, 2021).

Research gap, meskipun kajian mengenai rivalitas antara Quad dan China di kawasan Indo-Pasifik telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada dinamika kekuatan besar dan implikasinya secara global, tanpa secara mendalam menelaah bagaimana negara non-aliansi seperti Indonesia merespons tekanan geopolitik tersebut dalam konteks kepentingan nasional, kebijakan luar negeri bebas aktif, dan ketahanan maritimnya (Denisov et al., 2021). Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis dilema strategis Indonesia dalam menyeimbangkan kerja sama ekonomi dengan China melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan peluang kerja sama pertahanan serta infrastruktur dari negara-negara Quad (Scott, 2018). Berdasarkan celah ini, penelitian ini mengajukan pertanyaan "Bagaimana strategi Indonesia dalam merespons rivalitas antara Quad dan China di kawasan Indo-Pasifik guna menjaga stabilitas keamanan maritim, mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, dan melindungi kepentingan nasional, khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif seperti Laut Natuna Utara?" (Riyanto et al., 2023).

Landasan teori yang digunakan; 1) Neorealisme yang menjelaskan bahwa rivalitas ini muncul sebagai konsekuensi dari anarki sistem internasional, di mana negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China berupaya mempertahankan dominasi dan keamanannya masing-masing; (Scott, 2018) 2) teori dilema keamanan, mengatakan bahwa peningkatan kapasitas pertahanan oleh satu pihak, baik oleh China maupun negara-negara Quad, mendorong respons defensif dari pihak lain, sehingga memperburuk ketegangan kawasan (Hagström & Bremberg, 2022); dan 3) Teori geopolitik maritim turut memberikan perspektif penting dengan menyoroti peran strategis Indonesia sebagai negara kepulauan

yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta berdekatan dengan jalur laut vital seperti Laut China Selatan (Noorali et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti dinamika rivalitas antara Quad dan China di kawasan Indo-Pasifik. Misalnya, studi oleh Alexandra O'Brien et al. (2022) menekankan bahwa kebangkitan kembali Quadrilateral Security Dialogue merupakan respons langsung terhadap meningkatnya agresivitas China, khususnya melalui program Belt and Road Initiative (BRI) dan klaim teritorial di Laut China Selatan (Lee, 2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa Quad tidak hanya dibentuk sebagai aliansi strategis, tetapi juga sebagai upaya membentuk norma alternatif berbasis demokrasi dan keterbukaan dalam pembangunan infrastruktur (Cannon & Rossiter, 2022). Sementara itu, studi lain seperti yang dilakukan oleh D. Rajagopalan (2021) menganalisis peran Quad dalam strategi keamanan maritim dan bagaimana inisiatif ini memengaruhi tatanan Indo-Pasifik yang berbasis aturan (Mastro, 2022). Namun, kedua studi tersebut belum banyak membahas bagaimana negara non-blok seperti Indonesia menghadapi dilema antara tekanan geopolitik dan kepentingan domestik, khususnya dalam menjaga kedaulatan maritim dan prinsip politik luar negeri bebas aktif (Jaishankar & Madan, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Indonesia dalam merespons rivalitas strategis antara Quad dan China di kawasan Indo-Pasifik, dengan fokus pada implikasinya terhadap keamanan maritim, kebijakan luar negeri, dan kepentingan nasional Indonesia (Riyanto et al., 2023). Penelitian ini juga bermaksud untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam menjaga keseimbangan strategis, khususnya terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara, serta dalam menavigasi kerja sama ekonomi dan pertahanan dengan kedua blok kekuatan besar tanpa kehilangan kemandirian diplomatik dan strategis (Riyanto et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara mendalam implikasi strategis rivalitas antara Quad dan China terhadap posisi Indonesia dalam dinamika kawasan Indo-Pasifik, khususnya dalam aspek keamanan maritim, kebijakan luar negeri, dan pertahanan nasional (Turale, 2020). Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas fenomena geopolitik yang multidimensional secara kontekstual, termasuk interaksi antar aktor negara dan non-negara dalam kerangka kepentingan nasional Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis data sekunder artikel jurnal ilmiah, website dan dokumen terkait seperti undang-undang (Bradshaw et al., 2017).

Untuk memastikan validitas, keterkinian, dan netralitas politik sumber data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan mengutamakan dokumen dari lembaga internasional kredibel, jurnal terindeks, serta dokumen resmi negara-negara terkait. Pemilihan data dibatasi pada periode setelah 2017, dengan fokus tematik pada isu Indo-Pasifik, keamanan, ekonomi, dan respons strategis Indonesia. Pendekatan analisis dokumen dipilih karena dinilai lebih replikatif dan sesuai dengan keterbatasan akses terhadap aktor elit, meskipun wawancara pakar dapat menjadi rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Untuk membedakan opini dan fakta, peneliti menerapkan protokol validasi dengan melihat keberadaan bukti empiris, kredibilitas penulis atau institusi, serta kejelasan antara data objektif dan opini normatif. Artikel opini hanya digunakan jika relevan secara kontekstual dan dianalisis secara kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Berdasarkan Regulasi

Tekanan strategis yang signifikan terhadap Indonesia diukur melalui beberapa indikator utama, antara lain peningkatan aktivitas militer negara-negara besar di sekitar wilayah Indonesia khususnya Laut China Selatan termasuk intensifikasi latihan militer Quad dan patroli militer China. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap Belt and Road Initiative (BRI) dan tekanan diplomatik untuk berpihak dalam blok geopolitik menjadi indikator objektif yang mencerminkan posisi strategis Indonesia yang terjepit di tengah rivalitas global. Data-data tersebut diperoleh dari laporan pertahanan tahunan, publikasi think tank internasional (seperti CSIS dan IISS), serta laporan resmi ASEAN dan Kementerian Luar Negeri RI. Sementara itu, keberhasilan strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam menjaga netralitas ditunjukkan melalui konsistensi posisi Indonesia yang tidak berpihak, sebagaimana tercermin dalam pernyataan resmi di forum Indo-Pacific, ASEAN Outlook on the Indo-

Pacific (AOIP), serta keikutsertaan Indonesia dalam latihan militer dengan berbagai pihak secara seimbang. Indonesia juga aktif mempromosikan prinsip sentralitas ASEAN dan menjalin kerja sama pertahanan secara bilateral dengan berbagai kekuatan tanpa menjadi bagian dari aliansi militer tetap, yang secara empiris mengindikasikan strategi "free and active" tetap terjaga.

Dasar Hukum dan Posisi Strategis Indonesia, Pembahasan rivalitas Quad dan China di kawasan Indo-Pasifik tidak dapat dilepaskan dari posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang diakui secara hukum melalui Deklarasi Djuanda 1957 dan UNCLOS 1982, serta peran nasional yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 dan 11, Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Purwoko, 2020). Di sisi lain, Doktrin Poros Maritim Dunia memperkuat peran Indonesia sebagai kunci dalam jalur perdagangan global, yang otomatis membuat Indonesia berada di titik strategis dalam rivalitas kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.

Quad sebagai Respons Strategis terhadap Ambisi China (Rafique & Shah, 2024). Quad dibentuk sebagai bentuk kerja sama strategis non-aliansi antara Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia untuk merespons pengaruh dan ekspansi geopolitik China yang dikenal dengan naman Belt and Road Initiative (BRI). Sejak dihidupkan kembali pada KTT ASEAN 2017 di Manila, Quad tidak hanya fokus pada latihan militer seperti Malabar, tetapi juga memperkuat interoperabilitas, pendanaan infrastruktur, dan pengamanan jalur komunikasi penting. Quad memperluas pengaruhnya melalui Blue Dot Network (BDN) dan pengurangan dominasi China di sektor strategis seperti vaksin, kabel bawah laut, dan rantai pasokan global.

Reaksi dan Strategi Balasan China terhadap Quad (Koga, 2020). China secara konsisten mengecam Quad sebagai bentuk "NATO Asia", menganggapnya sebagai upaya containment terhadap ekspansi global China. Pernyataan China pada pertemuan Quad Februari 2025 menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap narasi "penyelarasan strategis" yang disampaikan AS dan sekutunya. Xi Jinping secara terbuka menilai kehadiran Quad sebagai ancaman terhadap visinya menjadikan China sebagai kekuatan dominan global hingga 2035. Rivalitas ini menandakan pergeseran kontestasi dari sekadar diplomasi ekonomi menjadi pertarungan pengaruh dan legitimasi politik internasional.

Keperluan dan Posisi Indonesia dalam Rivalitas Quad-China (YOSHIMATSU, 2024). Sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas kawasan dan menolak hegemoni asing, termasuk menolak klaim sepihak China di Laut China Selatan. Di sisi lain, keterlibatan dalam koalisi seperti Quad dapat dianggap berisiko memperkeruh hubungan dengan China, mitra dagang utama Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia cenderung memilih pendekatan strategic hedging, menjaga keseimbangan hubungan sambil memperkuat diplomasi maritim dan pertahanan nasional melalui kajian kebijakan pertahanan negara dan postur ideal Tentara Nasional Indonesia (TNI) berbasis pada upaya meningkatkan kepentingan nasional.

Implikasi Strategis bagi Indonesia, Quad vs China membawa sejumlah implikasi strategis bagi Indonesia (Abbondanza, 2022): (a) Militer dan Keamanan. Latihan perang dan kehadiran militer asing di kawasan dapat meningkatkan ketegangan dan risiko konflik terbuka di perairan dekat wilayah Indonesia. (b) Politik Luar Negeri. Indonesia harus menjaga posisi netral aktif tanpa terjebak dalam blok kekuatan besar yang bisa menggerus kedaulatan diplomatik. (c) Ekonomi dan Infrastruktur. Persaingan BRI vs BDN memberikan peluang pendanaan dan pembangunan infrastruktur, namun juga menuntut selektivitas dan kewaspadaan terhadap jebakan ketergantungan. (d) Kedaulatan Maritim. Indonesia perlu memperkuat postur pertahanan laut dan diplomasi maritimnyakhususnya di wilayah rawan seperti Natuna Utara yang masuk dalam area klaim Nine Dash Line oleh China.

Analisis Berdasarkan Berbagai Aspek

Aspek Keamanan, Rivalitas strategis antara Quad (Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia) dan China di kawasan Indo-Pasifik, regional ASEAN, membawa dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan kawasan ASEAN. Laut ini merupakan jalur vital perdagangan global dan pusat sengketa klaim teritorial yang mempertemukan kepentingan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dominasi klaim sepihak China yang bertentangan dengan hukum internasional, terutama dengan Nine Dash Line, telah memperburuk dinamika keamanan regional. Bagi Indonesia, ketegangan ini semakin relevan karena bersinggungan langsung dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa Laut China Selatan, tumpang tindih klaim antara China dan wilayah Indonesia telah menimbulkan friksi yang berulang. Militerisasi kawasan oleh China melalui pembangunan infrastruktur militer dan kehadiran kapal penjaga pantai memicu

kekhawatiran tentang potensi konflik terbuka. Persaingan antara China dan Quad juga meningkatkan kehadiran militer asing di kawasan. Latihan gabungan dan patroli maritim oleh anggota Quad seperti AS dan Australia menandakan upaya penyeimbangan terhadap pengaruh China. Namun, hal ini dapat memperkuat dinamika konfrontatif yang berdampak pada keamanan maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis penghubung Samudra Hindia dan Pasifik, stabilitas kawasan adalah kunci bagi keselamatan jalur pelayaran dan perlindungan sumber daya nasional Indonesia. Indonesia perlu merespons dengan peningkatan kemampuan pertahanan maritim, penguatan pengawasan di wilayah ZEE, dan diplomasi regional aktif untuk mencegah eskalasi. Pendekatan ini harus dilakukan dengan tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan komitmen pada penyelesaian damai dan ketertiban dunia.

Aspek Ekonomi, Dari sisi ekonomi, rivalitas Quad dan China menempatkan Indonesia dalam posisi strategis yang kompleks. Di satu sisi, Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas China telah memberi dorongan besar pada pembangunan infrastruktur nasional seperti pelabuhan, jalan raya, dan kereta cepat. China merupakan mitra dagang utama Indonesia, dan ketergantungan terhadap investasi China masih tinggi di sektor strategis. Di sisi lain, Quad kini menawarkan alternatif melalui Blue Dot Network (BDN), sebuah inisiatif yang menekankan pembangunan infrastruktur dengan standar tinggi, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan masuknya opsi-opsi pembangunan dari negara-negara Quad, Indonesia memiliki peluang untuk diversifikasi sumber pendanaan dan menghindari ketergantungan yang terlalu dalam pada satu negara. Namun, dilema muncul ketika ketegangan geopolitik menyertai hubungan ekonomi tersebut. Ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada China berisiko menimbulkan tekanan politik atau ancaman terhadap kedaulatan nasional. Sebaliknya, terlalu mendekat ke Quad bisa memicu ketegangan diplomatik dengan China. Oleh karena itu, keseimbangan strategis ekonomi harus dijaga agar Indonesia tetap memiliki ruang manuver yang fleksibel dan berdaulat dalam menentukan arah pembangunan nasionalnya.

Aspek Politik, Secara politik, rivalitas Quad dan China menantang implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Di tengah tekanan dari dua kekuatan besar, Indonesia harus cermat menjaga netralitas strategis tanpa kehilangan pengaruh atau peluang kerja sama. Posisi geografis Indonesia yang strategis di jantung Indo-Pasifik memberi keuntungan sebagai aktor kunci kawasan, namun sekaligus membuka kerentanan terhadap ekspektasi dan tekanan dari kedua belah pihak. Di tengah meningkatnya kontestasi maritim dan ekonomi, Indonesia dihadapkan pada dilema diplomatik karena menjalin kerja sama yang bermanfaat tanpa terjebak dalam polaritas kekuatan. Indonesia harus memosisikan diri sebagai kekuatan penengah yang dapat menjadi penggerak stabilitas kawasan. Untuk menjaga posisi ini, Indonesia perlu terus memperkuat peran aktif dalam ASEAN, memaksimalkan platform multilateral seperti PBB dan IORA, serta mendorong pendekatan diplomasi kolektif guna menyeimbangkan kepentingan strategis di kawasan. Indonesia juga harus menjaga solidaritas kawasan ASEAN dalam menghadapi tekanan eksternal yakni kekuatan China dan Quad.

Aspek Pertahanan dan Kepentingan Nasional, Rivalitas Quad dan China berdampak langsung pada kepentingan pertahanan dan kedaulatan Indonesia, terutama di wilayah perbatasan maritim yang sensitif seperti Laut Natuna Utara. Ketegangan di kawasan menuntut Indonesia untuk mempertimbangkan ulang pendekatan strategis pertahanannya, apakah akan tetap mengadopsi kebijakan non-blok, atau mulai menjalankan strategi balancing melalui kerja sama terbatas dengan kekuatan besar. Kerja sama dengan negara-negara Quad dapat meningkatkan kapasitas pertahanan nasional, transfer teknologi militer, dan peningkatan interoperabilitas dalam menghadapi tantangan keamanan laut. Namun, hal ini harus dilakukan tanpa melanggar prinsip kemandirian dan tanpa memicu provokasi dari China, yang bisa merugikan hubungan ekonomi dan diplomatik jangka panjang. Alternatif lain adalah memperkuat diplomasi pertahanan melalui kerja sama non-aliansi, latihan gabungan yang terbuka, serta membangun kapasitas pertahanan maritim nasional secara mandiri. Indonesia juga harus mengamankan jalur logistik laut, pelabuhan strategis, dan sumber daya laut dalam bingkai pertahanan negara yang berorientasi pada kepentingan nasional. Pendekatan ini harus dijalankan dengan mengembangkan postur pertahanan adaptif, melibatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri, dan memanfaatkan peluang kerja sama internasional tanpa kehilangan kedaulatan strategi militer.

Temuan dan Diskusi

Penelitian ini menemukan bahwa rivalitas antara Quad dan China di kawasan Indo-Pasifik memberikan tekanan strategis yang signifikan terhadap posisi geopolitik dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam aspek keamanan, dominasi China di Laut China Selatan, serta meningkatnya aktivitas

militer negara-negara Quad, secara langsung berdampak pada stabilitas kawasan, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara. Sementara Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa wilayah tersebut, posisi geografisnya yang strategis menempatkannya dalam risiko implikasi konflik yang lebih luas. Di sisi lain, secara ekonomi, Indonesia berada dalam dilema antara memanfaatkan peluang investasi dari China melalui BRI dan membuka jalur kerja sama alternatif dengan Quad yang menawarkan pembangunan infrastruktur berkualitas melalui inisiatif seperti Blue Dot Network.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana yang diamanatkan pada pembukan undang-undang dasar 1945 sebagai dasar legal Indonesia, namun menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan hubungan antara dua kekuatan besar yang saling bersaing. Dalam konteks pertahanan dan kepentingan nasional, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas pertahanan maritim Indonesia dan intelijen strategis guna melindungi kedaulatan wilayah dan jalur perdagangan vital. Selain itu, diplomasi pertahanan menjadi instrumen kunci dalam menjaga keseimbangan strategis tanpa terjerat dalam aliansi militer yang dapat menimbulkan risiko ketergantungan dan membuka konflik serta menciderai politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Agar Indonesia dapat tampil sebagai kekuatan penyeimbang dalam rivalitas Quad-China, langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi penguatan diplomasi aktif di forum regional dan global seperti ASEAN, IORA, dan PBB untuk membangun konsensus kawasan dan mendorong penyelesaian damai atas isu Laut China Selatan. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan kapasitas pertahanan maritim, khususnya di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara, guna menjaga kedaulatan dan menunjukkan kemandirian dalam keamanan kawasan. Diversifikasi kerja sama luar negeri dengan tetap menjaga prinsip non-blok juga penting, agar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan pada salah satu pihak. Di samping itu, Indonesia dapat memimpin inisiatif regional dalam membentuk mekanisme dialog dan pencegahan konflik di Indo-Pasifik. Penguatan ekonomi nasional, terutama di sektor maritim, industri strategis, dan energi, akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam percaturan geopolitik kawasan.

Kesimpulan

Temuan penelitian adalah bahwa rivalitas antara Quad dan China diperkirakan akan terus menjadi kekuatan utama yang membentuk dinamika strategis kawasan Indo-Pasifik dalam dekade mendatang. Bagi Indonesia, rivalitas ini membawa implikasi strategis yang bersifat multidimensi, mencakup aspek keamanan, ekonomi, politik, dan pertahanan nasional. Ketegangan geopolitik yang meningkat menuntut respons yang tepat, cermat, dan adaptif dari Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi geostrategis yang vital. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia harus mengedepankan pendekatan yang holistik dan fleksibel, dengan tetap berlandaskan pada kepentingan nasional serta prinsip politik luar negeri bebas aktif. Langkah konkret yang perlu diambil antara lain: memperkuat pertahanan nasional, kemandirian ekonomi, memodernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dengan teknologi modern, meningkatkan kapasitas intelijen strategis, serta mendiversifikasi kerja sama luar negeri guna menghindari ketergantungan pada satu blok kekuatan global yang berdampak pada terancamnya prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan penyeimbang dalam rivalitas global didasarkan pada posisi strategisnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di jalur penting perdagangan internasional antara Samudra Hindia dan Pasifik. Dengan memperkuat posisi regional melalui diplomasi aktif, Indonesia dapat memainkan peran sentral dalam membentuk norma dan stabilitas kawasan, terutama melalui forum seperti ASEAN dan kerja sama Indo-Pasifik. Daya saing ekonomi yang berkelanjutan, termasuk penguatan infrastruktur, industri strategis, dan kemandirian energi, akan memperkuat ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan eksternal. Di sisi lain, pembangunan postur pertahanan yang mandiri dan adaptif memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan wilayah serta merespons ancaman asimetris secara fleksibel. Argumen utamanya adalah bahwa Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, memiliki legitimasi moral dan posisi geografis untuk berperan bukan hanya sebagai penonton atau objek dari persaingan Quad-China, tetapi sebagai aktor strategis yang mampu mengarahkan arsitektur keamanan dan kerja sama kawasan ke arah yang lebih damai, inklusif, dan berbasis kepentingan kolektif.

Implikasi praktis bagi para pembuat kebijakan mencakup perlunya perumusan strategi Indo-Pasifik nasional yang tegas dan berorientasi jangka panjang, penguatan kapabilitas pertahanan nasional di wilayah maritim strategis, serta pengembangan diplomasi multilateral yang proaktif guna menjaga keseimbangan kepentingan nasional di tengah rivalitas kekuatan besar. Penelitian ini memperkaya teori

hubungan internasional Indonesia dan memberi kerangka analisis strategis bagi kebijakan luar negeri. Saran bagi penelitian ke depan, disarankan pendekatan kuantitatif atau mixed-method untuk mengukur dampak rivalitas Quad dan China secara lebih terstruktur.

Referensi

- Abbondanza, G. (2022). Whither the Indo-Pacific? Middle power strategies from Australia, South Korea and Indonesia. *International Affairs*, 98(2), 403–421. <https://doi.org/10.1093/ia/iab231>
- Bradshaw, C., Atkinson, S., & Doody, O. (2017). Employing a Qualitative Description Approach in Health Care Research. *Global Qualitative Nursing Research*, 4. <https://doi.org/10.1177/2333393617742282>
- Cannon, B. J., & Rossiter, A. (2022). Locating the Quad: informality, institutional flexibility, and future alignment in the Indo-Pacific. *International Politics*, 0123456789. <https://doi.org/10.1057/s41311-022-00383-y>
- Denisov, I., Paramonov, O., Arapova, E., & Safranchuk, I. (2021). Russia, China, and the concept of Indo-Pacific. *Journal of Eurasian Studies*, 12(1), 72–85. <https://doi.org/10.1177/1879366521999899>
- Gabriel, J. P. N., Mandelbaum, H. G., & Carvalho, C. E. (2020). The Quad. *Carta Internacional*, 15(2), 52–82. <https://doi.org/10.21530/ci.v15n2.2020.1014>
- Ha, H. T. (2022). Understanding the Institutional Challenge of Indo-Pacific Minilaterals to ASEAN. *Contemporary Southeast Asia*, 44(1), 1–30. <https://doi.org/10.1355/cs44-1a>
- Hagström, L., & Bremberg, N. (2022). Aikido and world politics: a practice theory for transcending the security dilemma. *European Journal of International Relations*, 28(2), 263–286. <https://doi.org/10.1177/13540661211070145>
- He, K. (2021). The Balance of Infrastructure in the Indo-Pacific: BRI, Institutional Balancing, and Quad's Policy Choices. *Global Policy*, 12(4), 545–552. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12970>
- Jaishankar, D., & Madan, T. (2021). How the Quad Can Match the Hype. *Foreign Affairs*, April, 1–4. <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-04-15/how-quad-can-match-hype>
- Koga, K. (2020). Japan's "Indo-Pacific" question: Countering China or shaping a new regional order? *International Affairs*, 96(1), 49–73. <https://doi.org/10.1093/ia/iiz241>
- Lee, L. (2020). Assessing the Quad: Prospects and Limitations of Quadrilateral Cooperation for Advancing Australia's Interests. *Lowy Institute Analysis*, May, 1–44.
- Lennan, M. (2021). New Knowledge and Changing Circumstances in the Law of the Sea, edited by Tomas Heidar. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 36(4), 702–706. <https://doi.org/10.1163/15718085-bja10070>
- Mastro, O. S. (2022). Deterrence in the Indo-Pacific. *Asia Policy*, 17(4), 8–18.
- Maulana, A. A. (2022). Gunboat Diplomacy in Natuna Waters from 2010–2020: Indonesia's Deterrence in South China Sea Conflict. *Insignia: Journal of International Relations*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2022.9.1.4550>
- Noorali, H., Flint, C., & Ahmadi, S. A. (2022). Port power: Towards a new geopolitical world order. *Journal of Transport Geography*, 105(October), 103483. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2022.103483>
- Purwoko, A. A. (2020). the Material of Wawasan Nusantara As Indonesian Geopolitic Note and the Implementation in Islamic State University. *At-Turats*, 14(1). <https://doi.org/10.24260/at-turats.v14i1.1785>
- Rafique, S., & Shah, A. (2024). Quadrilateral Security Dialogue: India's Strategic Ambiguities in the Indo-Pacific Region. *UCP Journal of Humanities & Social Sciences ...*, 2(June), 19–33. <http://58.27.199.232/index.php/jhss/article/view/48%0Ahttp://58.27.199.232/index.php/jhss/article/download/48/136>
- Riyanto, B., Djumala, D., & Tan, Y. (2023). Indonesia's Strategic Narrative on the New Dynamics of Great Power Rivalry in the Indo-Pacific. *Journal of ASEAN Studies*, 11(1), 143–166. <https://doi.org/10.21512/jas.v11i1.9406>
- Scott, D. (2018). The Indo-Pacific in US Strategy: Responding to Power Shifts. *Rising Powers Quarterly*, 3(2), 19–43.
- Turale, S. (2020). A brief introduction to qualitative description: A research design worth using. *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, 24(3), 289–291.
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wilkins, T. S. (2019). The Quad process: The evolution of diplomatic and maritime security cooperation in the Indo Pacific. *Policy Brief*, 1–10. <https://www.jiia-jic.jp/en/news/policy-briefthe-quad-process-the-evolution-of-diplomatic-and-maritime-security-cooperation-in-the-in.html>
- Wiraputra, A., Bawono, S. K., & Aji, K. P. (2022). Coastal State Responsibility and Rights in Regard to Fisheries Resources in EEZ. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(4), 21–29. <https://doi.org/10.31014/aior.1996.01.04.31>
- YOSHIMATSU, H. (2024). India and Japan in the Indo-Pacific: Secondary Powers' Strategies amid the Intensifying US-China Rivalry. *The Journal of Indian and Asian Studies*, 5(2), 1–25. <https://doi.org/10.1142/s2717541324400059>